

BAB I

PENDAHULUAN

A. ALASAN PEMILIHAN JUDUL

Fenomena politik internasional bersifat dinamis, terus menerus berubah yang membawa arti baru bagi perkembangan politik negara-negara itu sendiri. Berbagai macam peristiwa yang terjadi berjalan cepat dan tidak terduga sama sekali. Ditengah-tengah pergolakan politik internasional yang diwarnai dengan munculnya terorisme yang turut mempengaruhi panggung politik internasional, para pengamat politikpun sibuk membahas, memberikan asumsi-asumsi serta perkiraan-perkiraan sehubungan dengan hal ini.

Ancaman yang terjadi di bumi ini dari waktu ke waktu mengalami perubahan. Ancaman yang terjadi tersebut seringkali sulit untuk diprediksi dan terjadi secara tidak terduga atau tiba-tiba. Sama halnya dengan ancaman yang selalu terjadi di setiap negara, baik ancaman masalah politik, pertahanan ataupun masalah ekonomi.

Ancaman terorisme merupakan suatu ancaman yang sangat berpengaruh bagi dunia internasional. Berbagai cara yang dilakukan oleh dunia dalam upaya pemberantasan terorisme. Hal inilah menjadikan suatu negara dengan negara lain melakukan kerjasama dalam pemberantasan terorisme. Indonesia merupakan negara yang selalu mengalami ancaman

aksi terorisme, beberapa kejadian aksi terorisme terjadi di Indonesia bahkan kejadian itu menjadi perhatian dunia.

Tragedi 11 September 2001, Tragedi Bom Bali, Tragedi Hotel JW.Marriot, dan Bom Kuningan telah mendorong masyarakat internasional khususnya Indonesia untuk meningkatkan kewaspadaannya terhadap terorisme dalam segala bentuk dan manifestasinya, karena aksi terorisme dapat terjadi kapan saja dan di mana saja tanpa mengenal waktu dan tempat. Isu terorisme sekarang ini menjadi isu global yang perlu dicermati dan disikapi oleh bangsa Indonesia secara tepat, hal ini dikarenakan kita harus mengambil sikap yang jelas terhadap terorisme internasional.

Aksi peledakan bom di Bali telah membawa dampak luas bagi kehidupan politik, ekonomi, perdagangan, investasi, dan pariwisata Indonesia. Peristiwa Bali telah sekali lagi membuktikan bahwa tidak ada satupun di dunia yang kebal terhadap ancaman terorisme. Upaya untuk memerangai dan mengatasi aksi terorisme tersebut memerlukan kebijakan dan kerjasama internasional. Untuk itulah, penulis tertarik untuk mengambil judul “ Kerjasama Australia-Indonesia Dalam Mengatasi Ancaman Terorisme di Indonesia”.

B. LATAR BELAKANG

Hubungan bilateral Indonesia dan Australia tergolong hubungan yang unik, di satu sisi menjanjikan berbagai peluang kerjasama namun di sisi lain juga penuh dengan berbagai tantangan. Kondisi ini disebabkan oleh berbagai perbedaan menyolok diantara negara dan bangsa bertetangga, yang terkait dengan kebudayaan, tingkat kemajuan pembangunan, orientasi politik yang mengakibatkan pula perbedaan prioritas kepentingan.

Secara umum hubungan Indonesia-Australia cukup dekat dan baik. Kedua pihak selalu berusaha memanfaatkan setiap peluang yang ada untuk peningkatan berbagai kerjasama bilateral. Dukungan Australia terhadap keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan faktor kunci dalam upaya meningkatkan hubungan bilateral tersebut. Untuk konteks yang lebih luas, dan dalam rangka membangun hubungan yang saling menguntungkan, telah pula ada Forum Tingkat Menteri Indonesia-Australia (Indonesia-Australia Ministerial Forum/IAMF) dan ada kerjasama Indonesia-Australia yang tertuang dalam “Lombok Treaty”.

Isu terorisme dalam hubungan Indonesia-Australia diawali ketika terjadi ledakan di Bali pada 12 Oktober 2002. Ledakan tersebut menewaskan 203 orang termasuk 88 warga Australia. Peristiwa ini mengundang reaksi dari negara asing untuk memberi bantuan, tidak

terkecuali Australia. Segera setelah itu, Indonesia dan Australia terlibat dalam serangkaian aksi kerja sama memberantasan terorisme di kawasan.

Warga Australia kerap menjadi korban sasaran terorisme, di antaranya pengeboman Bali pada 12 Oktober 2002, hanya setahun setelah peristiwa 11 september, mengingatkan seluruh bangsa bahwa teroris memang beroperasi di wilayah mereka, dan siap melakukan serangkaian serangan secara acak atau non-diskriminatif. Peristiwa mengerikan ini tidak hanya membunuh ratusan orang Indonesia dan orang asing yang tidak terkait, terutama orang Australia, tapi juga merusak keseluruhan citra Pulau Bali sebagai tempat teraman di Indonesia.

Seperti sudah diduga banyak orang, suksesnya penyelidikan Bom Bali dipengaruhi oleh dukungan banyak negara, terutama Australia. Pada 2004, sebuah bom meledak tepat di depan Kedubes Australia di Kuningan, Jakarta, yang menewaskan sembilan orang. Polisi Indonesia, melalui Densus 88, berhasil menangkap mereka yang berada di balik rangkaian serangan teror itu.¹

Lebih dari sekedar kerjasama baik, suksesnya penyelidikan ini juga menjadi titik balik hubungan Indonesia-Australia, yang sebelumnya memburuk akibat Timor Leste di tahun 1999. Disisi lain, kerjasama terkini antara Indonesia dan politik federal Australia dalam memecahkan dan

¹ <http://dunia.vivanews.com/news/read/186436-pm-gillard-berterimakasih-kepada-polri> Diakses 22 November 2011

menyelidikan kasus pemboman Bali membuktikan bahwa kedua negara ini dapat bekerja sama dalam kampanye melawan teror. Dalam masalah terorisme, tak ada yang bisa menyangkal fakta bahwa rakyat Indonesia dan Australia sama-sama merupakan korban kekerasan para militan seperti terlihat dalam insiden 2002, 2004, dan 2005. Karenanya, terorisme merupakan musuh bersama kedua bangsa.

C. POKOK PERMASALAHAN

1. Apa saja bidang kerjasama Australia – Indonesia dalam mengatasi ancaman terorisme?
2. Mengapa Australia melakukan kerjasama dengan Indonesia dalam mengatasi ancaman terorisme?

D. KERANGKA TEORI

Teori Pengambilan Keputusan (Decision Making)

Teori pembuatan keputusan untuk menjelaskan pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah yang berkaitan dengan proses pembuatan kebijakan luar negeri. Batasan politik luar negeri menurut Jack C.Plano dan Roy Olton adalah: “Politik luar negeri merupakan strategi atau rencana tindakan yang dibentuk oleh para pembuatan keputusan suatu negara dalam menghadapi negara lain atau unit politik internasional lainnya dan dikendalikan untuk mencapai tujuan nasionalnya yang

spesifik, dituangkan dalam termologi kepentingan nasionalnya”. Dari definisi tersebut terlihat empat unsur dalam politik luar negeri, yaitu strategis, aktor pembuat keputusan, lingkungan eksternal, dan kepentingan suatu negara. Jadi politik luar negeri merupakan langkah nyata guna mencapai, mempertahankan, dan melindungi kepentingan negara tersebut.²

Sedangkan William D. Coplin menjelaskan bahwa pengambilan keputusan dalam menentukan politik luar negeri dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu:

- 1) Politik Dalam Negeri
- 2) Kondisi Ekonomi dan Militer
- 3) Konteks Internasional³



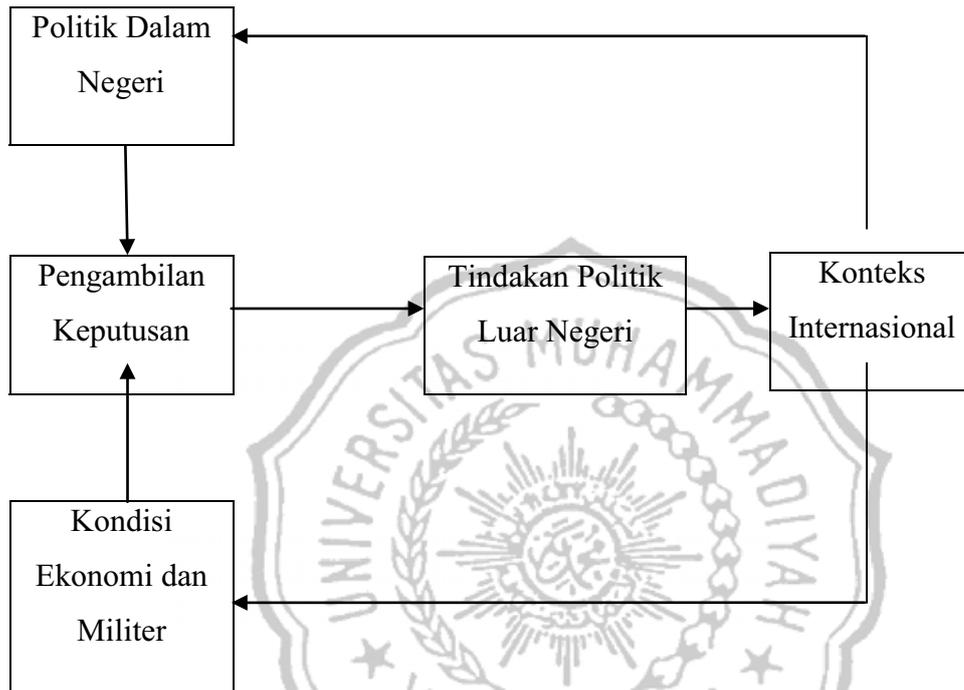
² Jack C Plano dan Roy Olton, *The International Relations Dictionary*, 3rded. (England:Lio Press Ltd,1982), hal.7

³ William D. Coplin, *Pengantar Politik Internasional: Suatu Telaah Teoritis*, Sinar Baru, Bamdung, 1992,hal 30

Tabel 1.1

Pengambilan Kebijakan Politik Luar Negeri

William D. Coplin



Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut bisa dijelaskan mengenai mengapa Australia melakukan kerjasama Indonesia dalam mengatasi aksi terorisme di Indonesia.

A. Kondisi Politik Dalam Negeri

Politik dalam negeri pada sebuah negara pada umumnya dipengaruhi secara kuat oleh birokrat, partai sekaligus kepentingan masyarakat. Birokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan yang

dijalankan oleh pegawai sipil pemerintah yang melalui suatu hirarki atau jenjang jabatan. Disamping itu makna mengenai birokrasi adalah suatu bidang yang sistematis dan bukan merupakan hal yang pragmatis yang diindentikan dengan suatu hal yang menghambat kemajuan suatu negara.⁴

Keberadaan partai politik di negara maju ataupun di negara berkembang, keberadaannya memiliki peranan yang strategis sebagai media dalam menyalurkan aspirasi publik, sekaligus menjadi kontrol bagi kinerja pemerintahan disuatu negara. Dalam pembahasan ini makna mengenai partai yang mempengaruhi (Partisan Influencer) adalah bertujuan menerjemahkan tuntutan-tuntutan masyarakat menjadi tuntutan-tuntutan politis, yakni tuntutan-tuntutan kepada para pengambil dan pembuat keputusan (Pemerintah).⁵

Sistem partai yang mempengaruhi ini pada dasarnya banyak menekan para penguasa dengan menyediakan personel-personel yang dapat berperan dalam pengambilan keputusan. Partai yang mempengaruhi menurut William De Copllin dapat dipandang sebagai informasi dua arah yang mempengaruhi para pengambil keputusan resmi dan anggota masyarakat, demikian halnya juga sebaliknya. Partai yang mempengaruhi dalam hal ini banyak memfokuskan perhatian pada masalah pembentukan kebijakan dalam negeri, sekaligus dapat mempengaruhi orientasi politik

⁴ BN, Marbun, Kamus Politik Edisi Baru, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2005, hal.74.

⁵ Ibid.

luar negeri, terutama apabila kebijakan-kebijakan itu membawa percabangan (ramifikasi) diantara berbagai masalah dalam negeri yang kritis dan kompleks.

Australia sebagai korban aksi terorisme di Indonesia yang memakan banyak korban warga Australia, memuat Australia memfokuskan diri pada Indonesia. Hal ini karena mengangku keamanan warga Australia di Indonesia dan keamanan regional. Dibawah PM Howard yang tidak bersahabat, Australia diharuskan AS untuk lebih ramah terhadap pemerintah Indonesia.⁶

Bahkan Menteri Pertahanan Australia Robert Hill menyatakan akan bekerja sama dengan Komando Pasukan Khusus untuk menangkal terorisme. Desakan juga datang dari Partai Buruh. "Ini saatnya bagi perdana menteri untuk mengambil langkah dan mengajukan kerja sama kembali antara Australia dengan Kopassus," kata Jurubicara Hubungan Luar Negeri Partai Buruh Kevin Rudd. Dia setuju dengan Hill yang mengatakan bahwa Australia harus memikirkan kembali untuk bekerja sama menangkal terorisme dengan Kopassus paska ledakan di Bali, 12 Oktober silam. Rudd mengatakan bahwa Perdana Menteri Australia John Howard merupakan langkah mandeg baginya jika menutup kerja sama dengan Kopassus, yang terkenal karena diduga punya hubungan dengan Laskar Jihad, kelompok militan Islam dan mungkin juga terlibat dalam

⁶http://www.southsearepublic.org/article/188/read/Liberal_Secularism_is_the_Answer_to_Terrorism 22 November 2011

serangan terhadap warga asing di Papua baru-baru ini. "Saya akan dituduh menerapkan standar ganda yang luar biasa," kata Rudd yang melihat Kopassus bisa meredam perlawanan Jamaah Islamiyah sebelum meledakan Bali. "Tapi kerja sama itu akan membuktikan apakah Kopassus terlibat dengan salah satu kelompok militan Islam atau tidak," ujarnya.⁷

Di tingkat institusi pertahanan, setelah adanya pertemuan informal antara pejabat tinggi pertahanan di Canberra 8-12 Juli 2002, dilanjutkan di Bali 12 September 2002 guna merumuskan bentuk-bentuk kerjasama bilateral untuk kepentingan kedua angkatan bersenjata. Bahkan PM John Howard telah memerintahkan Menteri Luar Negeri Alexander Downer, Menteri Kehakiman Chris Ellison, Komisaris Polisi Internasional Mick Kelly, dan Kepala Organisasi Kontra Intelijen Domestik Dennis Richardson untuk memaksimalkan kerjasama antara Australia-Indonesia.⁸

B. Kondisi Ekonomi dan Militer

Kemampuan ekonomi dan militer dipengaruhi oleh sistem pertahanan. Faktor ekonomi sangat berpengaruh pada kemampuan Negara dalam mempengaruhi keputusan politik luar negeri. Kemampuan ekonomi

⁷ <http://koran tempo:Partai-Buruh-Australia-Desak-Pemerintahnya-Segera-Gandeng-Kopassus.htm>, 22 Novmeber 2011

⁸ Koran Tempo, 15 Oktober 2002

yang besar, maka suatu Negara akan memiliki power yang besar pula dalam melaksanakan pengambilan keputusan politik luar negeri lain. Dalam kata lain ekonomi merupakan salah satu kekuatan yang bersifat Pressure bagi Negara lain.⁹

Sejak terjadinya serangan 11 September 2001 di Amerika Serikat, terorisme menjadi ancaman yang serius bagi Australia dan kepentingan-kepentingan Australia di luar negeri. Secara khusus, ancaman-ancaman berasal dari Al-Qaeda, Jemaah Islamiyah (JI) serta organisasi terorisme lainnya yang memiliki kesamaan ideologi dengannya.

Jemaah Islamiyah (JI) merupakan organisasi terorisme regional yang berada di kawasan Asia Tenggara. JI bertanggung jawab terhadap terjadinya Bom Bali I (2002), Bom Mega Kuningan I (2003), Bom Bali II (2005), juga pengeboman Kedutaan Besar Australia di Jakarta pada tahun 2004 yang merupakan ancaman besar bagi warga negara Australia dan kepentingan-kepentingan Australia, serta Bom Mega Kuningan II (2009). Australia secara fundamental diidentifikasi oleh JI sebagai bagian dari negara Barat, beraliansi dengan Amerika Serikat, memiliki counter-terrorism baik regional maupun global, serta komitmen militernya di Timor Timur, Afghanistan dan Irak.

⁹ William D. Coplin, Pengantar Politik Internasional: Suatu Telaah Teoritis, Sinar Baru, Bamdang, 1992.

Data intelijen menunjukkan Indonesia merupakan salah satu negara sasaran maupun tempat beroperasinya kegiatan terorisme internasional. Teror bom di Indonesia mulai terkuak pasca penyerangan terhadap *World Trade Centre* (WTC) di Amerika Serikat 11 September 2001. Saat itu beberapa peringgi negeri seperti Amerika Serikat, Singapura, dan Australia memperingatkan adanya jaringan terorisme internasional di Indonesia. Menanggapi tudingannya itu, pemerintah Indonesia membantah *warning* itu karena dikategorikan sebagai dugaan tanpa bukti atau tudingannya tanpa dasar.¹⁰

Lebih jauh lagi, pada sisi yang lebih teknis, tampak jelas badan-badan keamanan kita tampaknya tidak dilengkapi untuk memperbaiki dan menghadapi tindakan-tindakan teror di Indonesia. Intelijen, terutama intelijen manusia, seperti yang diakui banyak orang, adalah salah satu bagian paling rapuh dalam pertahanan di antara berbagai badan intelijen Indonesia dilihat dari sumber utama masalah.

Banyak yang menganggap bahwa polisi dan militer sebagai kekuatan-kekuatan utama dalam melawan terorisme tidak dapat memenuhi harapan publik. Sebagai contoh, polisi sebagai penyelidik gagal memecahkan banyak kasus pemboman, yang berkembang pesat sejak berakhirnya rezim Suharto. Forum Indonesia Damai (FID), mencatat setidaknya 140 kasus pemboman terjadi di Indonesia sejak 1976, dengan

¹⁰ DR. A.C. Manullang, *Terorisme & Perang Intelijen: Dugaan Tanpa Bukti*, Manna Zaitun, Jakarta, 2006, hal.245.

peningkatan yang signifikan sejak 1998 (81 kasus pada 2001). Jumlah yang begitu tinggi jika kita memasuki juga insiden pemboman di daerah-daerah konflik.¹¹

Australia banyak membantu Polri dalam berbagai hal yang bersinggungan dengan pemberantasan terorisme. Penyebutan polisi anti teror dengan “Detasemen Khusus 88 Anti-Terror” atau dikenal dengan sebutan Densus 88 juga ada hubungan dengan Australia. Angka “88” ini adalah jumlah WN Australia yang tewas dalam Bom Bali I, sekaligus kalangan Markas Besar Kepolisian Negara RI (Mabes Polri) banyak yang mengatakan angka “88” melambangkan “bersatunya dua borgol terkunci”. Tidak hanya itu saja, proses pembentukan Densus 88 juga melibatkan Australia.

Krisis keamanan yang di alami Indonesia pasca bom Bali menyebabkan ketidakpercayaan pada investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia, krisis keamanan ini telah membuat perekonomian (investasi, penjualan barang-barang asli budaya Indonesia, serta pajak) menurun. Untuk itu Indonesia membuka kerjasama internasional khususnya terhadap Australia dalam menyediakan infrastuktur atau finansial yang amat dibutuhkan dalam permasalahan ini.

Dalam hal ini pemerintah Australia memberikan komitmennya untuk menjalin kerjasama dalam bidang ekonomi dengan pemerintah

¹¹ Lihat Kontras, “Analisis Kasus Peledakan Bom di Bali: Mengapa Teror Terjadi”, dalam Rusdi Marpaung & Al Araf (ed), Terorisme: Definisi, Aksi dan Regulasi, Jakarta: Imparsial. 2003, hal.37

Indonesia dalam memerangi terorisme dengan memberikan bantuan keuangan sejumlah 10 juta dollar Australia yang setara dengan 50 miliar rupiah. Pemberian bantuan itu tertuang dalam Joint Ministerial Statement on Counter-Terrorism. Bantuan tersebut untuk melacak aliran dana teroris, meningkatkan keamanan tempat pariwisata serta memperkuat kapasitas kepolisian Indonesia menghadapi teroris dan kejahatan transnasional.

C. Konteks Internasional

Konteks internasional (situasi di negara yang menjadi tujuan politik luar negeri), serta pengaruh dari negara-negara lain yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi. Proses pembuatan keputusan luar negeri sangat memperhatikan faktor ini karena suatu ukuran yang akan menjadi pertimbangan yang digunakan oleh para pembuat keputusan. Hal ini terkait dengan penyesuaian sikap Negara dengan keadaan yang terjadi didalam kehidupan internasional. Jika keadaannya damai maka keputusan yang diambil pun bersifat kooperatif, namun jika keadaannya tidak stabil karena adanya gangguan, maka keputusannya cenderung akan bersifat mempertahankan diri atau mencari dukungan dari Negara lain.

Upaya ini sangat tidak mudah mengingat kecenderungan tindakan yang dilakukan untuk menjadi warga internasional yang baik kadang sering bertabrakan dengan upaya untuk memenuhi *national interest* negara tersebut yang lain ataupun kadang muncul pertentangan bahkan oleh

warga negaranya sendiri. Bagi Australia sendiri upaya agar negaranya dilihat sebagai warga internasional yang baik tertuang dalam elemen politik luar negeri Australia yang kemudian diterjemahkan menjadi pokok-pokok politik luar negeri Australia.

Hal ini penting mengingat posisi Australia dalam dunia internasional sebagai sebuah negara *middle power* yang kekuasaan dan pengaruhnya masih terbatas, dibandingkan dengan negara *great power*. Oleh karena itu Australia merasa perlu memberikan kesan bahwa negaranya adalah negara beradab yang patut untuk diperhitungkan, layak diajak untuk bekerjasama dan dapat dipercaya.

Berbagai upaya pun dilakukan oleh Australia untuk mendapatkan predikat tersebut termasuk diantaranya memberikan bantuan kepada negara-negara dunia ketiga dalam lingkup regionalnya (negara-negara di Asia dan Pasifik Selatan), membantu korban bencana alam, dsb. Namun, seperti yang telah disebutkan di atas tidak semua upaya menjadi warga internasional yang baik berjalan dengan mulus tanpa hambatan.

Tercatat beberapa bentuk konkrit upaya Australia, khususnya dalam kepemimpinan PM John Howard, untuk menjadi warga internasional yang baik tidak berjalan seperti yang diharapkan sebelumnya karena berbagai macam faktor. Salah satu upaya yang tidak berjalan dengan mudah tersebut adalah menyangkut kebijakan pemerintah Australia yang mengirimkan pasukannya ke Irak.

Menyusul terjadinya peristiwa serangan teroris pada 11 September 2001 terhadap Amerika Serikat, menimbulkan pengaruh yang signifikan terhadap percaturan politik internasional pasca berakhirnya perang dingin. Rangkaian peristiwa sesudahnya benar-benar menimbulkan banyak kegemparan. Mulai dari dikeluarkannya kebijakan anti-terorisme oleh Amerika Serikat yang kemudian diikuti oleh negara-negara sekutunya, dan pada gilirannya merembet hingga dilakukannya invasi Amerika Serikat ke Afganistan dan ke Irak.

John Howard juga menyatakan keterlibatan Australia dalam invasi tersebut juga sesuai dengan pokok kebijakan luar negeri Australia, menjadi good international citizen, yaitu menjaga keamanan dan perdamaian dunia. Australia percaya bahwa Saddam Hussein adalah ancaman terhadap perdamaian. Saddam Husein yang dianggap berbahaya bagi perdamaian dunia, tidak dapat dibiarkan memiliki senjata pemusnah massal.

Karenanya pelucutan senjata pemusnah masal yang selama ini diinginkan oleh banyak negara dianggap akan mendatangkan perdamaian dunia. Pemerintah Australia juga mengatakan bahwa sebenarnya mereka tidak ingin menggunakan cara militer yang akan penuh kekerasan untuk menghadapi Irak, jika Irak bersedia bekerjasama.

Konsep Kerjasama Internasional

Suatu konsep adalah abstraksi yang mewakili suatu obyek, atau suatu fenomena tertentu.¹² Konsep ini merupakan “suatu alat komunikasi” atau bahasa dalam kegiatan pemikiran sehingga hal ini diabstraksikan dari kesan yang ditangkap melalui indera (sense impression) dan digunakan untuk memnyampaikan dan mentransmisikan persepsi dan informasi. Selanjutnya konsep ini merupakan kesepakatan masyarakat penggunanya.

Adapun konsep kerjasama internasional tersebut sudah dibayangkan oleh program PBB dan dicerminkan dalam berbagai perkembangan hubungan internasional modern.

“Hubungan internasional berdasarkan prinsip-prinsip piagam PBB dan Resolusi Majelis Umum PBB yang relevan cenderung memajukan perdamaian dan keamanan dengan memperkuat ikatan antar negara, menciptakan hubungan antara mereka yang saling menguntungkan dan efektivitas kerjasama itu dapat dijamin dengan baik, dengan penataan kembali. Disamping itu hubungan tersebut juga akan lebih lancar apabila dilakukan tidak hanya terbatas antara pihak pemerintah, tetapi juga melibatkan semua sektor masyarakat.”¹³

Hubungan internasional secara umum adalah hubungan yang dilakukan antar negara yaitu unit politik yang didefinisikan menurut territorial, populasi dan otonomi wilayah serta penghuninya tanpa

¹² Mohtar Mas' oed, *“Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin Dan Metodologi “*, LP3ES, Yogyakarta, 1990 hal.9

¹³ Morgenthau, *“Perserikatan Bangsa-Bangsa, Hubungan antara Pelucutan Senjata dan Keamanan Internasional”*, New York, 1982 hal.86

menghiraukan homogenitas etnisnya.¹⁴ Hal ini dilakukan oleh suatu negara guna memenuhi kepentingan nasionalnya, karena kepentingan nasional itu dapat melukiskan aspirasi suatu negara secara operasional. Dalam penerapannya berupa tindakan atau kebijakan yang sangat aktual dan rencana-rencana yang menjadi tujuan suatu negara.¹⁵

Sedangkan menurut K.J Holsti, yang mendefinisikan kerjasama internasional adalah:

“Sebagian besar transaksi atau interaksi negara dalam sistem internasional sekarang ini bersifat rutin dan hampir bebas dari konflik. Berbagai jenis masalah nasional, regional, dan global bermunculan dan memerlukan pembicaraan mengenai masalah yang dihadapi dan mengemukakan berbagai bukti teknis untuk menyelesaikan permasalahan tertentu, beberapa perjanjian yang memuaskan semua pihak ini disebut dengan kerjasama.”¹⁶

Dari pengertian diatas, berkaitan dengan kerjasama internasional yang dilakukan oleh pemerintah Australia dengan pemerintah Indonesia dalam memerangi terorisme di Indonesia, mengingat terorisme sudah menjadi suatu isu internasional yang menglobal yang semakin meresahkan dunia. Untuk itu, berbagai upaya dilakukan oleh kedua belah pihak seperti kerjasama dalam bidang politik, militer, ekonomi maupun budaya.

¹⁴ Thedore.A.Coulombis & James Wolfe, ahli bahasa oleh Mercedes Marbun, *Pengantar Hubungan Internasional: Keadilan Dan Power*, Bandung, Abardin, 1990.hlm 66

¹⁵ J.Frankel, *International Relations*, terjemahan Laila Hasyim, Ans Sungguh Bersaudara (Jakarta, 1980)

¹⁶ K.J. Holsti, “politik International Studi Analisis Ii”, Erlangga, Jakarta, 1998 hal.89

Perses kerjasama itu tercipta dikarenakan rasa saling membutuhkan satu sama lain. Hal ini dikarenakan dalam hidup bermasyarakat, tidak bisa terlepas dari hubungan antara satu dengan lainnya, hubungan yang terjalin inilah yang biasa disebut interaksi. Interaksi sendiri dapat merupakan suatu hubungan-hubungan sosial yang dinamis orang perorang, antara kelompok manusia, maupun antara kelompok manusia dengan orang-perorang. Dalam era globalisasi, frekuensi interaksi antar negara-negara menjadi bertambah tinggi yang disebabkan oleh perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan. Interaksi tersebut menyebabkan terbentuknya suatu kerjasama, baik dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, politik, pendidikan, kesehatan, maupun dalam bidang pertahanan dan keamanan. Kerjasama antar negara dapat meningkatkan hubungan negara-negara di dunia internasional menjadi semakin harmonis.

Kerjasama dalam memerangi terorisme di Indonesia yang dilakukan oleh Pemerintah Australia dimulai semenjak adanya rasa ketakutan Australia terhadap teroris pasca tragedi WTC yang terjadi di kota New York dan Washington pada tanggal 11 September 2001 silam, dan semenjak itu Australia merasa takut dengan hal-hal yang berkaitan dengan Islam. Hal ini dilatarbelakangi oleh pelaku pemboman WTC yang dilakukan oleh jaringan Al Qaeda. Peristiwa pemboman juga terjadi di Indonesia, diantaranya adalah pemboman yang terjadi di Bali pada tanggal 12 Oktober 2002, pemboman Hotel J.W Marriott Jakarta pada 5 Agustus 2003, dan pemboman yang terjadi di depan Kedubes Australia di kawasan

Kuningan Jakarta pada 9 September 2004. Peristiwa itu pesinyalir dilakukan oleh jaringan teroris Jamaah Islamiyah. Kejadian-kejadian tersebut telah membuat Australia perlu mawas diri terhadap Indonesia karena letak Australia yang berdekatan dengan Indonesia dan ditakutkan terorisme akan memperluas aksinya sampai ke Australia.

Rentetan pemboman ini disinyalir dilakukan oleh organisasi teroris yang berbasis Islam dan dalam hal ini Indonesia kembali menjadi sorotan Internasional dan dianggap sebagai sarang teroris sehingga dunia internasional mengeluarkan *travel warning* kepada setiap warga negaranya untuk tidak melakukan kunjungan ke Indonesia untuk sementara waktu. Hal ini juga berlaku untuk warga negara Australia yang ditegaskan oleh Menteri Luar Negerinya pada saat itu Alexander Downer se usai pertemuan keenam Australia-Indonesia Ministerial Forum di Jakarta.¹⁷

Hubungan kerjasama internasional mengalami berbagai tantangan dan perubahan yang cukup mendasar, sejalan dengan proses transisi politik yang terjadi didalam negeri. Disamping itu, aksi terorisme telah memberikan dampak yang dapat merusak hubungan kerjasama yang telah terjalin sebelumnya. Sehingga berbagai kebijakan yang dikeluarkan dapat menyudutkan Indonesia dalam mencapai kepentingan nasional di luar negeri. Aksi terorisme yang terjadi di Indonesia seperti, tragedi bom Bali, bom kuningan dan aksi terorisme yang terjadi di beberapa wilayah di

¹⁷ [www.Mail 2 factsonf.de/pipe mail/national/2002.september/00866.html](http://www.Mail2factsonf.de/pipe%20mail/national/2002.september/00866.html), 12 April 2011

Indonesia, membuat dunia internasional meningkatkan hubungan kerjasama dalam memerangi terorisme dibuktikan dengan melakukan kesepakatan kerjasama dengan Pemerintah Australia sebagai negara tetangga yang tertuang dalam Joint Intelligence Team Investigation pada tanggal 7 February 2002 di Malaysia, yang berisikan kerjasama memerangi terorisme antar kedua negara.

Dalam melakukan kerjasama dengan negara lain, suatu negara tidak terlepas dari kepentingan nasionalnya. Menurut KJ.Holsti, kepentingan nasional digunakan sebagai perangkat untuk menganalisis tujuan kepentingan nasional suatu negara,¹⁸ seperti apa yang dicatat oleh Paul Seabury sebagai berikut:

“Istilah kepentingan nasional berkaitan dengan beberapa kumpulan atau tujuan suatu negara lain. Dengan kata lain, gejala lain tersebut merupakan suatu normatif atau konsep umum kepentingan nasional. Arti kedua yang sama pentingnya biasanya bersifat deskriptif yaitu kepentingan nasional dianggap sebagai kepemimpinan pemerintah. Kepentingan nasional dalam pengertian deskriptif, berarti memindahkan metafisika kedalam fakta (kenyataan) dengan kata lain kepentingan nasional serupa dengan para perumus politik luar negeri.”¹⁹

Dalam hubungan Australia-Indonesia, kedua negara mempunyai kepentingan yang sama yaitu dalam meningkatkan keamanan negara. Kepentingan nasional Australia yaitu menjadikan Australia sebagai negara yang lebih aman, baik dari segi fisik, ekonomi, politik dan budaya

¹⁸ KJ.Holsti, *Politik Internasional Suatu Kerangka Analisis*, Bina Cipta, 1997, hal.168

¹⁹ Paul Scabury, *“Power Freedom dan Diplomacy: The Foregin Policy of The United State America* (New York: Random House, 1963) hal.88 dalam KJ.Holsti, op.cit,hal.169

termasuk ideology dan nasional etnisnya, menjadikan dunia yang lebih aman, suatu dunia yang lebih baik dan lebih makmur untuk ditinggali. Kepentingan nasional Australia dalam hal *Security Objectives* yaitu bagaimana menjaga keamanan Australia baik secara individual (*Self-Reliance*), ataupun dalam bentuk kerangka aliansi militer. Seperti militer dibawah payung Amerika Serikat seperti SEATO (South East Asia Treaty Organization) dan ANZUS (Australia, New Zealand and The United State), serta kerangka aliansi militer dibawah payung Inggris FPDA (Five Power Defence Arrangement), maupun dalam kerangka kerjasama regional dengan pemerintah Republik Indonesia yang ditanda tangani pada masa pemerintahan Paul Keating yaitu Agreement on Maintaining Security, yaitu membangun jaring-jaring laba-laba kerjasama keamanan dengan negara-negara ASEAN dan negara-negara di Pasifik Selatan.²⁰

Kepentingan nasional suatu bangsa dan negara muncul dalam pergaulannya dengan negara-negara dan bangsa-bangsa lain baik secara bilateral maupun multilateral, dalam ruang lingkup regional maupun global. Suatu bangsa dan negara minimal akan berupaya sejauh mungkin untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dari pergaulan internasional untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Dalam hal ini jelas bahwa kepentingan nasional selalu menjadi landasan dan sekaligus tujuan bagi suatu negara dan bangsa dalam menyusun kebijaksanaan dan strategi

²⁰ Ikrar Nusa Bakti, "*Fakta Ekternal dan Internal Yang Mempengaruhi Kebijakan Luar Negeri Dan Pertahanan Australia*", Lembaga Penelitian LIPI 2001 hal.31

yang disepakati dalam pergaulannya dengan berbagai bangsa dan negara di kenacah internasional.

D. HIPOTESA

1. Bidang kerjasama antara Australia dan Indonesia dalam mengatasi terorisme terjalin dalam bidang militer, ekonomi dan budaya.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Australia melakukan kerjasama dengan Indonesia:

1) Politik Dalam Negeri

Desakan datang dari Partai Buruh kepada pemerintah Australia agar mengambil langkah dan mengajukan kerjasama antara Australia-Indonesia.

2) Kondisi Ekonomi dan Militer

Kekuatan militer Australia dan Indonesia yang berupaya dalam memerangi terorisme dengan menjalin kerjasama di bidang militer dan ekonomi.

3) Konteks Internasional

Pengaruh kebijakan anti terorisme Amerika Serikat melakukan agresi ke Irak dan Afganistan yang diikuti oleh sekutunya.

E. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk memberikan Deskripsi mengenai bidang kerjasama Australia-Indonesia dalam mengatasi terorisme di Indonesia.
2. Untuk mengkaji dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kerjasama Australia-Indonesia dalam mengatasi terorisme di Indonesia.
3. Merupakan usaha perluasan dan pendalaman pengetahuan Penulis terhadap metodologi ilmu Hubungan Internasional dan teori-teori politik Internasional pada umumnya dan pada dasarnya yang berkaitan dengan hubungan Indonesia-Australia.
4. Untuk melengkapi tugas akhir Penulis dan sekaligus sebagai penerapan teori-teori yang pernah diterima penulis pada masa aktif dalam perkuliahan.
5. Ditujukan untuk memenuhi persyaratan akademis yang dibebankan kepada Penulis pada jenjang studi Strata I di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Fakultas Ilmu Sosial dan Politik jurusan Hubungan Internasional tahun ajaran 2011-2012.

F. METODE PENGUMPULAN DATA

Dalam melakukan penelitian untuk penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data yang bersifat studi kepustakaan (library research). Untuk itu penulis mengambil referensi berupa buku-

buku literature, artikel, jurnal, website, koran, majalah dan berita televisi. Dari beberapa sumber itu penulis dapat mengumpulkan data yang akan digunakan sebagai bahan acuan dalam menjelaskan permasalahan ini.

G. RUANG LINGKUP PENELITIAN

Agar tidak terjadi pemahaman yang terlalu luas, maka penulis hanya akan mengambil batasan permasalahan ini hanya dari segi politik, militer serta ikut serta pihak internasional yang terjadi dalam berbagai permasalahan. Jangkauan penelitian tersebut diharapkan agar penyelesaian masalah yang muncul ini tidak kesalah pahaman. Sebab jika tidak diberikan batasan penelitian tersebut dikhawatirkan akan terjadi berbagai pemahaman dari orang yang akan ikut menganalisa permasalahan yang terjadi.

H. SISTEMATIKA PENULISAN

Bab I : Merupakan gambaran umum mengenai maksud dan tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi. Dalam bab ini, memuat Alasan Pemilihan Judul, Latar Belakang Masalah, Pokok Permasalahan, Kerangka Teori, Hipotesa, Tujuan Penelitian, Metode Pengumpulan Data, Ruang Lingkup Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II : Merupakan bab yang akan menjelaskan bidang-bidang kerjasama Australia-Indonesia dalam mengatasi ancaman terorisme.

BabIII :Merupakan bab yang akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kerjasama Australia-Indonesia dalam mengatasi ancaman terorisme.

Bab V : Adalah bab akhir berisikan kesimpulan dari bab-bab sebelumnya.

